

**KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM OLEH
PERUSAHAAN ASAL MALAYSIA KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA**

APRIOLA NAFTALIE DEWANI

Abstrak

Tujuan penulisan ini dilakukan adalah untuk menganalisis dampak dari adanya keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh perusahaan asal Malaysia atas tindakan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh KPPU. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun kebaruan dalam penelitian ini mengacu kepada penjelasan mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh KPPU untuk memperbaiki sistem pemberitahuan di Indonesia dan mencegah adanya struktur pasar yang terkonsentrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak yang dapat terjadi akibat keterlambatan akan merugikan pelaku usaha dari segi perekonomian dan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pihak struktural dan pihak finansial. Selain itu dalam hal ini KPPU juga memiliki tanggungjawab untuk melakukan perubahan atas rejim pemberitahuan yang semula *post notification* menjadi *pre notification* dan melakukan pembatasan HGU terhadap badan usaha untuk memberikan pengawasan secara optimal bagi KPPU sehingga dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: Keterlambatan Pemberitahuan, Akuisisi, KPPU

***DELAY NOTIFICATION OF SHARES ACQUISITION BY MALAYSIA
COMPANY TO THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY
COMMISSION***

APRIOLA NAFTALIE DEWANI

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the impact of the delay in notification of share acquisition by a company from Malaysia for the act of taking over company shares in Indonesia and the forms of liability that can be carried out by KPPU. This research was conducted using normative juridical research. The novelty in this research refers to the explanation of the forms of responsibility carried out by the KPPU to improve the notification system in Indonesia and prevent a concentrated market structure. The results of this study indicate that the impact that can occur due to delays will be detrimental to business actors in terms of the economy and interested parties such as structural parties and financial parties. In addition, in this case, KPPU also has the responsibility to make changes to the notification regime from post notification to pre notification and to limit HGU to business entities to provide optimal supervision for KPPU so as to prevent monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: Late Notification, Acquisition, KPPU